

## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

Teori yang dijadikan dasar dalam menjelaskan pengaruh *Leverage* dan Umur Perusahaan Terhadap Manajemen Laba serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut :

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theori*)

Terdapat beberapa konsep mengenai teori keagenan. Salah satu konsep teori keagenan menurut Lukas Setia Atmaja (2008:12) :

“Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara : (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi).”

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah :

“Hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Excecutive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.”

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling

dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*).

Dari uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara manajer dengan pemegang saham, dimana pemegang saham mempekerjakan manajer sebagai *agent* untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang saham.

## **2.1.2 Aktiva Pajak Tangguhan**

### **2.1.2.1 Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan**

Menurut Waluyo (2012:217) menyebutkan bahwa Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan adalah

“Aktiva yang terjadi apabila ada perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak.”

Menurut Plesko dalam Phillips (2003):

“bahwa perbedaan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan pelaporan masing-masing sistem, tetapi dapat juga karena GAAP (di Indonesia dikenal dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum) memberikan kebebasan yang lebih besar pada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk masing-masing periode dibandingkan dengan aturan perpajakan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai.

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktiva pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Dengan diberlakukannya PSAK 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

#### **2.1.2.2 Indikator Perhitungan Aktiva Pajak Tangguhan**

Aktiva Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217).

Dalam penelitian ini Aktiva Pajak Tangguhan dinyatakan dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$=$$

### 2.1.3 Beban Pajak Tangguhan

#### 2.1.3.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut Mohammad Zain (2008:187) pajak tangguhan terjadi akibat:

“Perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.”

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2008:70) mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah:

“Jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode”.

Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272)

“Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau

tahun pajak berjalan, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan, yaitu:

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.”

Beban pajak tangguhan menurut Scott dalam Yulianti (2004):

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.”

Menurut Harnanto (2003:112) beban pajak tangguhan adalah:

“Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.”

Healy, P. M. and Wahlen, J. M. 1999. 365 – 383.

“Deferred tax assets and deferred tax liabilities arise from temporary differences. Temporary differences arise when income or expense is recognized in the calculation of accounting profit that is different from the current year income or expense is recognized in the calculation of taxable income. Under [13], the measurement of deferred tax assets and liabilities as follows”:

1. Current tax liabilities (assets) for the current year and the previous year are recognized at the amount of tax payable, which is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
2. Deferred tax liabilities (assets) shall be measured at the tax rates that will apply when the liability is settled or the asset is realized, the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
3. Deferred tax assets and liabilities should reflect the tax consequences for the recovery of the carrying value of assets or

settlement of liabilities expected the company at the balance sheet date.

4. Deferred tax assets and liabilities should not be discounted (discounted).
5. The carrying amount of deferred tax asset should be reviewed (at the balance sheet date).

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

- a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.
- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Menurut Zain (2008:199) penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

1. Perbedaan permanen/tetap,

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui

sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiod (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (*counterbalance*)

2. Perbedaan waktu/sementara,
 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa:

  - a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deferred tax liability*.
  - b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deffered tax asset*.
3. Kompensasi kerugian,
 

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.
4. Kredit pajak investasi,
 

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengkontruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan sebelum pajak dengan

Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang.

Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Alokasi pajak interperiode.

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:

- a. Penghasilan operasional berkelanjutan
- b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut
- c. Hal-hal luar biasa
- d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan
- d. Penyesuaian dengan periode terdahulu

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.

Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

- a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu *reversal* beda temporer tersebut.
- b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
- c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.

Selanjutnya menurut Zain (2008: 186) kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*PSP-Pretax accounting income*) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (*PKP-Taxable income*), maka Beban Pajak (*BP-Tax expense*) akan lebih besar dari Pajak Terutang (*PT-Tax payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*KPT-Deffered tax liability*). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
2. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*PSP-Pretax accounting income*) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (*PKP*) dan Beban Pajaknya (*BP*) akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang (*PT*), sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*APT-Deffered tax assets*). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

### 2.1.3.2 Pentuan Pajak Tangguhan

Pada dasarnya bahwa PSAK No. 46 adalah cukup kompleks, karena untuk PSAK No. 46 secara utuh diperlukan juga pemahaman yang cukup atas UU PPh Indonesia. PSAK No. 46 mengatur mengenai tata cara pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bukan mengatur mengenai berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, maka untuk menghitung berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan.

Menurut Purba, (2009:68) penghitungan dasar pajak tangguhan:

“Hutang PPh dihitung berdasarkan laba akuntansi kena pajak. Akan tetapi, perlu disadari bahwa jumlah PPh yang nyata-nyata harus dibayar sesungguhnya adalah PPh terutang yang dihitung berdasarkan laba kena pajak, artinya biaya PPh bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari hutang PPh. Untuk itu, diperlukan suatu penangguhan dari biaya PPh yang terlalu cepat diantisipasi atau biaya PPh yang ditunda pembayarannya. Karenanya, hutang PPh atau PPh yang harus dibayar/disetor pada negara, di hitung sebagai berikut:

Laba akuntansi sebelum pajak

xxxx

Beda waktu

Biaya penyusutan	=	(xxx)	
Beban imbalan pasca kerja	=	xxx	
Jumlah beda waktu			xxxx
Beda tetap			
Pendapatan bunga	=	(xxx)	
Beban jamuan	=	xxx	
Jumlah beda tetap			xxxx
Laba kena pajak			xxxx
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan			xxxx
Laba kena pajak			xxxx

Apabila penyusutan fiskal lebih kecil daripada penyusutan komersial akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan laba komersial akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Besarnya pajak tangguhan dihitung dari besarnya penyusutan beda waktu dikalikan tarif pajak tangguhan. Berdasarkan Undang-Undang N0.36 tahun 2008, tarif pajak tangguhan adalah 25%.”

Purba (2009:44) menjelaskan lebih lanjut mengenai ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kewajiban dan aktiva pajak tangguhan :

(Dr) Beban pajak tangguhan	xxx
(Cr) Kewajiban pajak tangguhan	xxx
(Dr) Aktiva pajak tangguhan	xxx
(Cr) Manfaat pajak tangguhan	xxx

Berdasarkan pada penghitungan pajak penghasilan di atas, maka secara khusus penyajian dari perkiraan aktiva atau kewajiban PPh ditangguhkan berdasarkan PSAK No 46. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan

kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak (Kieso dan Weygant 2008:76) yang dialihbahasakan oleh Zain (2010 : 190) antara lain:

a. *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.

b. *Liability Method* (Metode Aktiva-Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di

neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

c. *Net of Tax method* (Metode Bersih dari Pajak)

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya *defferal method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang di komprehensif dan bukan alkasi perbedaan temporer yang parsial. Selain dari pada itu, keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah:

- 1.3.1.1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedang dilain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
- 1.3.1.2. Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau sumsi berkenaan dengan waktu pemulihan Penghasilan Kena Pajak kini maupun pada periode pemulihan atau tarif pajak.
- 1.3.1.3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban menggunakan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba-rugi perusahaan dan tidak bergabung dalam nilai individu aset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya metode pajak neto.
- 1.3.1.4. Kelemahan yang serius dari metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang

mempersalahkan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas aset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada masalah laporan laba-rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

### **2.1.3.3 Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan**

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Berdasarkan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Phillips et al. (2003) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan. adalah sebagai berikut:

Penggunaan total aset disebabkan beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer sehingga biaya dan penghasilan tahun lalu yang baru diakui pada tahun ini.

## **2.1.4 Manajemen Laba**

### **2.1.4.1 Pengertian Manajemen Laba**

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain antara lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh *National Association of Fraud*

*Examiners*, Fisher dan Resenzweig, Lewitt, serta Healy dan Wahlen dalam (Sulistyanto 2008:49).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* dalam Sulistyanto (2008:49):

*“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision.”*

Menurut Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008:49):

*“Earnings management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic profitability of the unit.”*

Menurut Lewitt dalam Sulistyanto (2008:50):

*“Management Laba is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliacy. Trickey is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions.”*

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:74) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba sebagai kemampuan untuk “memanipulasi: pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan”

Mulford Charles W & Eugene E.Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparani Harapap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Menurut Fahmi (2011:321) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“*Earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Manajemen laba menurut Scott, dalam Muid, (2005) adalah”

“Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi. Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.”

Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba.

Pengertian manajemen laba menurut Scott (2009:403) :

“Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Dimana manajemen laba menghasilkan pelaporan keuangan yang tidak netral yang didalamnya manajer secara intensif melakukan campur tangan untuk menghasilkan beberapa keuntungan pribadi.”

Sedangkan menurut Schipper dalam Sri Sulistyanto (2008) menyebutkan

bahwa:

“Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah proses campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

#### **2.1.4.2 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba**

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman dalam Halim, Meiden dan Tobing (2005) terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba yaitu :

##### *1. Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada di atas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

##### *2. Debt to Equity Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan

pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

### 3. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti: mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Secara Akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Fahmi (2011:322) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak *parsial* disini tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditor, *government* dan lainnya.

#### **2.1.4.3 Motivasi Manajemen Laba**

Praktek manajemen laba sesungguhnya sangat menguntungkan bagi beberapa pihak. Menurut Scott dalam Rahmawati dkk (2007) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

### 1. *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka berdasarkan *compensation plans* perusahaan.

### 2. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan aturan yang lebih ketat.

### 3. *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

### 4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Demikian juga dengan CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba agar tidak diberhentikan.

### 5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang *going public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

### 6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sulistyanto (2008:63):

#### 1. *Bonus Plan Hypothesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi.

Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memperlakukan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan inilah yang mengakibatkan pemilik

mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

### 2. *Debt Covenant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.

Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

### 3. *Political Cost Hypothesis*.

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil dan memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Menurut K. R. Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:131) mencatat ada tiga motivasi yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan

#### 2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan. Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal.

### 3. Insentis Lain.

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan pesaing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh.

#### 2.1.4.4 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott dalam Rahmawati dkk (2007) dapat dilakukan dengan cara:

##### 1. *Taking a Bath*

*Taking a bath* terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

##### 2. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

##### 3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang.

##### 4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

##### 5. *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba

##### 6. *Aggressive accounting applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

##### 7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

Menurut Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

- a. Peningkatan laba (*income increasing*)  
Peningkatan laba (*income increasing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
- b. Penurunan laba (*income decreasing*)  
Penurunan laba (*income decreasing*) adalah upaya perusahaan mengatur laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
- c. Perataan laba (*income smoothing*)  
Perataan laba (*income smoothing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Menurut Mulford Charles W & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan Aurolla Saparani Harahap oleh (2010:88) teknik atau tindakan manajemen laba meliputi:

1. Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus).
2. Mengubah umur harta – untuk menghitung depresiasi
3. Mengubah nilai sisa harta – untuk menghitung depresiasi
4. Menetapkan cadangan/ penyisihan piutang tak tertagih
5. Menetapkan cadangan/ penyisihan kewajiban warranty (jaminan)
6. Menentukan penilaian atas cadangan pajak tangguhan
7. Menentukan adanya kerusakan harta atau kerugian
8. Mengestimasi tahapan penyelesaian dari kontrak (dengan) metode persentase – penyelesaian
9. Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak
10. Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu
11. Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan
12. Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus

13. Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension
15. Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam proses
16. Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta tak berwujud
17. Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti: pengembangan urukan tanah, advertensi tanggap langsung, dan pengembangan piranti lunak
18. Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suatu derivative keuangan
19. Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan *investee* (anak perusahaan)
20. Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer.

Menurut Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih
3. Mencatat pendapatan palsu
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat.

#### 2.1.4.5 Indikator Manajemen Laba

Sulistyanto, 2012:161 menyebutkan Manajemen Laba adalah :

“Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan.”

Menurut Sulistyanto, 2012:163 Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah:

“Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi berbasis akrual untuk menghitung dan menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk itu laba akuntansi di atas harus dikurangi dengan arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Cash flow from operation*) selama periode bersangkutan.”

Menurut Sulistyanto, 2012:164 Setelah berhasil menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode, maka langkah kedua adalah

“Memisahkan komponen akrual itu menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum.”

Untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya digunakan rumus total *accruals*. Aharony (Scott, 1997) dalam Muid (2005) menerjemahkannya ke dalam persamaan:

Keterangan:

$TAC_{it}$  = Total *Accruals* periode tes

$NOI_{it}$  = *Net Operating Income* periode tes

$CFFO_{it}$  = *Cash Flow From Operations* periode tes

Menurut Healy dan De Angelo (Scott, 1997) dalam Muid (2005), total *accruals* terdiri dari *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Total *accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer.

Friedlan dalam Muid (2005) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

Keterangan:

$DAC_{it}$  = *Discretionary accrual* periode tes

$TA_{it}$  = *Total Accruals* periode tes

$Sales_{it}$  = Penjualan periode tes

$TA_{t-1}$  = *Total Accruals* periode dasar

$Sales_{t-1}$  = Penjualan periode dasar

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Yulianti	2005	Kemampuan Pajak Tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba	Perbedaannya terdapat pada kriteria pemilihan sampel, perusahaan pada penelitian Yulianti hanya perusahaan yang berada di sekitar <i>earnings threshold</i> .
2	Zulaikha Suranggane	2007	Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI Sebagai Predikator Manajemen Laba	Perbedaannya terdapat pada kriteria pemilihan sampel, perusahaan pada penelitian Suranggane meneliti yang bergerak pada sektor manufaktur

				sedangkan penulis menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor otomotif
3	Dini Onasis	2016	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Perbedaannya terdapat pada sampel penelitian, perusahaan pada penelitian Dini meneliti yang bergerak pada sektor manufaktur sedangkan penulis menggunakan perusahaan yang bergerak pada sektor otomotif.
4	Birgita Deviana S.P.	2009	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini Dalam Deteksi Manajemen Laba Pada Saat <i>Seasoned Equity Offerings</i>	Perbedaannya terdapat pada populasi penelitian. Birgita menggunakan populasi penelitian khusus perusahaan yang melakukan aktivitas <i>seasoned equity offerings</i> tahun 2007 dan 2008 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor utama Otomotif
5	Yana Ulfah	2014	Analisis Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini untuk Mendeteksi Manajemen Laba	Perbedaannya pada tahun pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan periode tahun 2008-2010 sedangkan penulis menggunakan

				periode tahun 2012-2016.
6	Inasa Singkianti	2015	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Perbedaan pada penelitian Inasa Singkianti yaitu pada sasaran jenis perusahaan yang di teliti.
7	Phillips, Pincus dan Rego	2003	<i>Earning Management: New Envidance Based on Deferred Tax Expense</i>	Perbedaan terdapat pada objek penelitian Phillips, Pincus dan Rego fokus pada perusahaan manufaktur sedangkan penulis fokus pada perusahaan sektor utama otomotif.
8	Alison Fox John R Grinyer Alex Russell	2006	<i>"An analysis of lobbying behaviour - The case of UK deferred taxation ", Journal of Applied Accounting Research, Vol. 8 Iss 1 pp. 72 - 107</i>	Perbedaannya pada tahun pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan periode tahun 2006 sedangkan penulis menggunakan periode tahun 2012-2016.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin,

bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Begitupun dengan aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Plesko (2002) dalam Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Artinya, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing pengaruh dari Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba**

Suranggane (2007:78) menyatakan “Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba Komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi laporan keuangan”. Aktiva Pajak Tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang.

Suranggane (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan dijadikan proyeksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan.

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspetasikan adanya peranan antara aktiva pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

### **2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba**

Jay Choi dan Suk-Joong (2012:80) menyatakan “Beban pajak tangguhan memberikan informasi tentang pendapatan saat ini dan masa depan (misalnya, persistensi laba dan pertumbuhan masa depan) dan berpotensi mengindikasikan manajemen laba.”

Menurut (Scott, 2000:361) dalam (Aristanti dan Cynthia, 2012:329) perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi

pajak adalah dengan menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan.

Phillips, Pincus, & Rego (2003:518) dalam (Aristanti dan Cynthia, 2012:329) dalam penelitiannya menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian.

Plesko (2002) dalam Phillips et al (2003) mengungkapkan

“... jika semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi, maka menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen yang terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.”

Plesko (2002) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan: “Tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. “... semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.”

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Phillips, Pincus dan Rego (2003) dalam Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian.

Penelitian yang dilakukan Yulianti (2005), Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah (2013), dan Inasa Singkianti (2015) membuktikan beban pajak tangguhan mempengaruhi praktik manajemen laba.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:

H1 : Suranggane (2007)

H2: Jay Choi dan Suuk-Joong (2012:80)

### **Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **2.3 Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh akitva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba secara keseluruhan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

H2: Terdapat Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.

H3: Terdapat Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.